P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH SUMATERA SELATAN

Azzahrah Juniska [1)], Sukmini Hartati[2*)], M. Husni Mubarok[3)]
[1,2,3)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Corresponding author[2)]:Sukmini03hartati@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021. Metode/Pendekatan: Variabel penelitian yang digunakan adalah belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah, Intergovernmental Revenue, dan SiLPA. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 13 kabupaten dan 4 kota dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunkan metode dokumentasi. 2 JAA 6.1 Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel-variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, Intergovernmental revenue, dan SiLPA secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Sedangkan secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Sedangkan variabel Interngovermental Revenue dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Kontribusi Praktik dan Teoritis/Orisinalitas: Implikasi penelitian ini sangat penting karena merupakan sumber informasi untuk mengetahui pengalokasian belanja bantuan sosial dalam laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: *Belanja Bantuan Sosial, Pendapatan Asli Daerah, Intergovernmental Revenue, dan SiLPA*

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the factors that influence the allocation of social spending assistance to district/city regional governments in South Sumatra Province in 2017-2021. Methodology/Approach: The research variables used are social assistance spending, local revenue, intergovernmental revenue, and SiLPA. The samples used were 13 regencies and 4 cities using purposive sampling method. Data is collected by using the documentation method. Findings: The results of this study show that simultaneously the independent variables, namely local original income, intergovernmental income, and SiLPA, have an influence on the allocation of social assistance spending. Meanwhile, partially, the Regional Original Income variable negative influences the allocation of social assistance spending. Meanwhile, the Interngovermental Revenue and SiLPA variables have no effect on the allocation of social assistance spending. Practical and Theoretical contribution/Originality: The implications of this research are very important because it is a source of information to determine the allocation of social assistance spending in government financial reports.

Keywords: *Expenditures for Social Assistance, Local Own Revenue, Intergovernmental Revenue, and SiLPA*

1. PENDAHULUAN

Penduduk di daerah kabupaten/kota Provinsi Sumsel Sebagian besar didominasi dari sektor pertanian, perternakan, kehutanan, perikanan dan pertambangan. Hal ini membuat Sebagian besar kabupaten/kota tersebut memiliki struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam atau memiliki potensi alam yang beragam. Namun potensi alam yang beragam ini teryata untuk beberapa kabupaten tidak tersebar secara merata, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan di masyarakat yaitu dari sisi kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi adanya kesenjangan tersebut, maka pemerintah Menyusun kebijakan dengan mengalokasikan anggaran ke dalam belanja bantuan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Belanja, Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang dibeirikan oleh Pemeirintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari segi kondisi topografi beberapa kabupaten/kota meimiliki kondisi wilayah yang berhadapan langsung dengan aliran sungai seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Ogan Komeiring Ulu Timur, sehingga membuat daerah tersebut rawan akan bencana banjir.

Kemudian terdapat juga beberapa kabupaten/kota yang meimiliki kondisi wilayah yang berbukit seperti Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komeirng Ulu, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam, yang membuat daerah tersebut rawan akan bencana tanah longsor. Selanjutnya ada juga kabupaten yang rawan akan bencana kebakaran lahan yang disebabkan karena kondisi wilayahnya berupa hutan yang dipenuhi lahan gambut seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan adanya persoalan yang berkaitan dengan beincana alam tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan bencana alam tersebut, maka pemerintah menganggarkan belanja bantuan sosial.

Peran Pemerintah Daerah berpengaruh untuk mengatasi permasalahan dalam pengalokasian belanja bantuan sosial tersebut yaitu dengan melakukan reformasi aturan anggaran yang berkaitan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam melakukan reformasi anggaran terkait dengan pengalokasian belanja bantuan sosial yaitu, kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun transfer pendapatan dari pemerintah pusat, Intergovernmental Revenue dalam laporan keuangan, dan SiLPA di setiap kabupaten/ kota.

Reformasi anggaran juga dapat dilakukan, berdasarkan beberapa hal yang mempengaruhi dengan reformasi anggaran di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pengalokasian belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial yang dialokasikan ke dalam APBD tentunya dipengaruh oleh faktor keuangan daerah. Dalam Permendagri No 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang didapat yang berasal dari Pendapatan Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting dalam keuangan daerah.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu, sumber keuangan daerh yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiriri pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2 Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick dalam Rochmatullah, 2014). Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan *Intergovernmental Revenue* (Suhardjanto, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, *Intergovernmental Revenue* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 14 yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah dan antar-Pemerintah Daerah. *Intergovernmental Revenue* terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3 *SiLPA*

Berdasarkan PSAP 02, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan. . Fungsi dari SiLPA yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Dalam penelitian Rochmatullah (2014), Jika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran pada tahun berjalan maka akan berdampak pada kecenderungan melakukan pembatasan belanja pada tahun berikutnya, dengan tujuan memperoleh SiLPA yang memadai guna menutup defisit tahun ini. Kemudian jika SiLPA tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif dan lebih dari cukup untuk membiayai pokok hutang/kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun berikutnya maka akan berdampak optimalisasi pengalokasian belanja daerah termasuk belanja bantuan sosial.

2.4 Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 15 terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data peneilitian yang digunakan data sekunder berupa LRA.

3.1Variabel Penelitian

Variabel Independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Praptiningsih (2015). Intergovernmental Revenue (X2) Interngovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemeirintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran Kembali Intergovernmental Revenue dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Rochamatullah (2014). dan SiLPA (X3) Sisa Lebih Perhitungan Amnggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran SiLPA dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Praptiningsih (2015), Rochmatuillah (2014), dan Fauzi (2014). dan Variabel Dependen digunakan yaitu Belanja Bantuan Sosial (Y) Belanja bantuan sosial merupakan belanja tidak langsung yang

dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sumatera selatan untuk membiayai kegiatan yang bersifat untuk kesejahteraan sosial.

3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:116), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:122).

Berdasarkan pengertian sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021. Memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.	17
2	Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun yang tidak mempublikasikan secara lengkap Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021 dan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota dalam website JDIH BadanPemeriksa Keuangan dan BPKAD kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021	8
Jumlah		9

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji statistic t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen atau PAD, Intergovermental Revenue, dan SiLPA berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen atau belanja bantuan sosial. Uji statistik t dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Titik kritis pada uji 2 sisi untuk sampel 45 adalah sebesar 2,01410 .Berikut ini adalah hasil uji statistik t dengan SPSS 29 :

Tabel 4.1
Uji Statistik t

		t	Sig.
Model			
1	(Constant)	4.617	<0.001
	PAD	-2.699	0.010
	DanaPerimbangan	-0.173	0.864
	Silpa	0.504	0.617

Berdasarkan Tabel 1 Hasil uji statistik t untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan angka koefisien sebesar -0.415. Nilai t hitung sebesar -2.699 lebih kecil dari titik kritis yaitu 2,014 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. PAD yang berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah, penurunan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan pemangkasan anggaran belanja sosial dan pengalihan dana pada sektor lain, yang berdampak pada berkurangnya efektivitas dan cakupan program bantuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara parsial pengalokasian belanja bantuan sosial pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengutamakan PAD sebagai sumber untuk alokasi belanja bantuan sosial, melainkan dari sumber penerimaan lainnya. Besar kecilnya jumlah pendapatan asli daerah mempengaruhi dana yang dialokasikan ke belanja bantuan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptiningsih

(2015) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Menurut Praptiningsih, Semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah, cenderung berdampak pada pengurangan alokasi belanja bantuan sosial. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor menurut Fauzi (2014). Pertama, daerah yang memiliki pendapatan asli yang tinggi mungkin menganggap bahwa masyarakatnya memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, sehingga kebutuhan akan bantuan sosial dianggap lebih rendah. Kedua, pemerintah daerah mungkin lebih cenderung mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih strategis untuk pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur atau pendidikan, ketimbang bantuan sosial yang dianggap sebagai pengeluaran konsumtif.

Hasil uji statistik t untuk variabel intergovernmental revenue menunjukkan angka koefisien sebesar -0,027. Nilai t hitung sebesar -0,173 dengan tingkat signifikansi 0,864.Karena Nilai t- hitung lebih besar dari titik kritis -2,014 dan signifikansi lebih tinggi dari 0,05 maka dapat disimpuilkan bahwa Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Interngovernmental Revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial bisa disebabkan oleh kebijakan alokasi anggaran yang kompleks, yang tidak selalu berfokus pada prioritas sosial, serta pertmbangan politik dan keibijakan makroekonomi yang mempengaruhi alokasi transfer anggaran tersebut.

Hal ini disebabkan karena pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat. Besarnya jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat 55 membuat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menggunakan pendapatan transfer sebagai sumber untuk mengalokasikan belanja bantuan sosial. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Intergovernmental revenue atau Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmatullah (2014) yang menyatakan bahwa Intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Menurut Rochmatullah, faktor-faktor lain seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan, dan prioritas kebijakan sosial juga dapat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan alokasi belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks tertentu, pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial mungkin tidak signifikan, dan faktor-faktor lain yang lebih spesifik dan langsung terkait dengan kebutuhan sosial dapat lebih dominan dalam menentukan alokasi anggaran

Hasil uji statistik t untuk variabel SiLPA menunjukkan angka koefisien sebesar 0.078. Nilai t hitung sebesar 0,504 lebih kecil dari titik kritis yaitu 2,014 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,617. maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. SiLPA yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial disebabkan oleh kebijakan pemda yang cenderung mengalokasikan dana pada sektor lain yang dianggap lebih prioritas daripada belanja bantuan sosial, serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang mempengaruihi keputusan penggunaan SiLPA.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial hal ini berarti besar atau kecilnya SiLPA yang dimiliki pemerintah pada tahun sebelumnya tidak mempengaruhi alokasi belanja bantuan sosial, karena SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD dan SiLPA terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang di tahun sebelumnya belum sempat terselesaikan dan tidak digunakan untuk membiayai alokasi belanja bantuan sosial di tahun berikutnya, serta SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasi belanja. Sehingga dalam penelitian in tidak sejalan dengan tori yang menyatakan fungsi SiLPA menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Semakin besar jumlah

SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial disebabkan oleh kebijakan pemda (pemerintah daerah) yang cenderung mengalokasikan dana pada sektor lain yang dianggap lebih prioritas daripada belanja bantuan sosial, serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang mempengaruhi keputusan penggunaan SiLPA

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rochmatullah (2014), Fauzi (2014) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial.

Berdasarkan tabel 4.1 maka hasil persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

Y=43.247-0.415X1-0.027X2+0.078X3

Adapun penjelasan dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah 43.247. Artinya jika Pendapatan Asli Daerah, Intergovernmental Revenue, SiLPA bernilai 0 maka belanja bantuan sosial bernilai positif yaitu sebesar 43.247.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (b1) bernilai negatif, yaitu -0.415. Artinya bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan maka pengalokasian belanja bantuan sosial akan menurun sebesar - 0.415 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Intergovernmental Revenue (b2) bernilai positif, yaitu 0,027. Artinya bahwa setiap peningkatan Intergovernmental Revenue sebesar 1 satuan maka pengalokasian belanja bantuan sosial juga akan meningkat sebesar -0,027 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel SiLPA (b3) bernilai negatif, yaitu 0,078 Artinya bahwa setiap peningkatan SiLPA sebesar 1 satuan maka pengalokasian belanja bantuan sosial juga akan menurun sebesar -0,078 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap

Uji statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simuiltan) memiliki pengaruh yang signifikan teirhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 untuk sampel 45 adalah sebesar 3,226. Berikut ini adalah hasil uji statistik F dengan SPSS 29.

Tabel 4.2
Uji Statistik F

Model		F	Sig.
1	Regression	2.766	0.054[b]
	Residual		
	Total		

Tabel 2 menunjukan bahwa uji statistik F menghasilkan nilai F perhitungan sebesar 2.766 dengan tingkat signifikansi 0,054. F hitung menunjukkan angka yang lebih besar dari pada F tabel atau 2.766 > 2,833 dan nilai signifikansi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, intergovernmental revenue, dan SiLPA secara bersama-sama (simuiltan) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rochmatullah (2014) yang menunjukkan Intergovernmental revenue dan SiLPA secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pemerintah daerah tingkat II di Indonesia. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2014) juga menunjukkan hasil yang sama terhadap variabel PAD, DBH, DAU dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

5. SIMPULAN

Pendapatan Asli daerah, Intergovernmental Revenue, dan SiLPA, secara bersama-sama (simuiltan) tidak berpengaruh sgnifikan terhadap Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial. Hal ini menunjukkan

bahwa ketika kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan asli daerah yang besar, mendapatkan pendapatan transfer yang tinggi, memiliki SiLPA yang banyak, maka akan mempengaruhi dalam pengalokasian belanja bantuan sosial tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Fauzi, Teuku. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Darah di Aceh. Tesis. Universitas Syiah Kuala Darusalam. Banda Aceh

Praptiningsih, F. S. D. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahu 2014*. Universitas PGRI Yogyakarta.

Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Andi Offset.

Putra, A. S. E. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 8 JAA 6.1. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2004. Undang0-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Rochmatullah, M. R. (2014). *Determinan Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitaitf, Kualitatif dan R&D* (Cetakan 21). Alfabeta.

Suhardjanto, D., & Lesmana. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

Suprianto, E. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Semarang. *Rptek, 8*(1).